

SINOPSIS

Runtuhnya rezim otoritarian menandai dimulainya babak baru guna membangun struktur serta sistem kekuasaan secara beradab. Sedangkan pemilihan umum diyakini sebagai jalan termurah dari pergantian kekuasaan. Sejak Indonesia terlepas dari pemerintahan orde baru bangsa Indonesia telah dua kali menjalankan pemilihan umum diantaranya tahun 1999 serta tahun 2004. Pemilihan umum pada pemilu 2004 yang mengacu kepada undang-undang nomor 12 tahun 2003 adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam proses politik. Yang ini terlihat dari sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka serta distrik yang pemilihannya dilaksanakan dengan memilih calon anggota legislatif secara langsung. Dengan demikian undang-undang nomor 12/2003 tentang pemilihan umum tak lepas dari kepentingan antara partai besar dan partai kecil mengenai bilangan pembagi pilih (BPP). Walaupun demikian secara suka cita pelaksanaan pemilu tetap berjalan dan secara mengejutkan partai Golkar menjadi pemenang dalam pemilu legislatif secara langsung. Kemenangan partai Golkar disatu sisi dituduh sebagai kekuatan rezim terdahulu (orde baru) disisi yang lain menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam dinamika politik kontemporer. Ini yang akan menjadi fokus permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi adalah data primer dan data sekunder diharapkan melalui studi ini dapat dilihat dari analisa pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif partai Golkar dalam pemilu 2004 serta gambaran secara umum mengenai profil dan daerah penelitian. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Indramayu dimana partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif 2004 serta DPD II partai Golkar.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif partai Golkar masih jauh dari undang-undang pemilu terutama tentang keterwakilan perempuan dalam memenuhi kuota 30 %. Sedangkan untuk mekanisme pemilihan legislatif telah berjalan dengan diberikannya hak dalam penentuan calon kepada pengurus kecamatan dan desa secara konvensi sedangkan keterlibatan tokoh masyarakat yang berada diluar partai untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif didaerah pemilihan yang dirasa kurangnya basis konstituen partai Golkar. Sedangkan untuk penentuan nomor urut diserahkan tim jaringan dari DPD II partai Golkar yang diketuai oleh ketua umum. Dari kesimpulan serta data-data yang didapat seharusnya partai Golkar memberikan ketentuani 30 % bagi perempuan dengan memberikan kesempatan lebih besar.

Sedangkan untuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pencalonan anggota legislatif hanya show politik saja tanpa memperhatikan fungsi partai politik yang seharusnya mendidik masyarakat. Intervensi ketua partai yang juga sebagai kepala pemerintahan (bupati). Ini menandakan bahwa partai Golkar masih ketergantungan. Seharusnya partai memberikan kebijakan dengan mendimisionerkan kader partai yang telah terpilih sehingga partai Golkar lebih mandiri.